

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH DI KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Raihan Firdaus
NPP. 30.1598

Asdaf Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara
Prodi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: 30.1598@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Ir. I Gede Suratha, MMA.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): One of the requirements for residents who will migrate both inbound and outbound migration must take care of the move-in letter. Tana Tidung Regency is a regency located in North Kalimantan Province which is a pemekaran district of Bulungan and Nunukan Regencies through the struggle for the declaration of its community leaders. The potential of this area is very much, one of which is from the oil and gas sector which is the largest contributor to income in North Kalimantan Province. **Purpose:** The purpose of this study describes strategies in improving the quality of moving certificate services in Tana Tidung Regency and to determine the factors that inhibit and encourage the Population and Civil Registration Office in population transfer services in Tana Tidung Regency. **Method:** This study uses qualitative research descriptive method with an inductive approach. Research data analysis techniques use data reduction, data display and conclusion drawing. In this writing, researchers use qualitative data analysis techniques combined with SWOT analysis. **Results:** Found driving factors in the issuance service of moving certificates are strong enthusiasm from residents who are already in Tana Tidung Regency, Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019, enthusiasm of apparatus and adequate facilities. The weaknesses are low public understanding in SKP management, service coverage far from service centers, limited apparatus human resources, and limited allocation of financing. The strategy used by the Dukcapil Office in improving the quality of SKP services in Tana Tidung Regency is to utilize strengths and minimize existing weaknesses. **Conclusion:** The strategy of the Tana Tidung Regency Population and Civil Registration Office in Overcoming the problem of moving certificate issuance services is a strategy to utilize strengths and minimize weaknesses by managing a Move Certificate (SKP) no longer requires returning to the area of origin to take care of SKP but can be facilitated by the Tana Tidung Regency Dukcapil Office to communicate with the area of origin.

Keywords: Quality of Service, Certificate of Move, SWOT Analysis, Strategy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Salah satu syarat bagi penduduk yang akan melakukan migrasi baik migrasi masuk maupun keluar wajib mengurus surat pindah datang. Kabupaten Tana Tidung adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan dan Nunukan melalui perjuangan deklarasi tokoh-tokoh masyarakatnya. Potensi dari daerah ini sangatlah banyak salah satunya dari sektor minyak dan gas yang menjadi penyumbang penghasilan terbesar di Provinsi Kalimantan Utara. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Surat Keterangan Pindah di Kabupaten Tana Tidung dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pindah penduduk di Kabupaten Tana Tidung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik analisis data penelitian menggunakan data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan). Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan Metode teknik analisis data kualitatif yang dipadukan dengan analisis SWOT. **Hasil/Temuan:** Ditemukan faktor-faktor pendorong dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah adalah antusiasme yang kuat dari penduduk yang sudah berada di Kabupaten Tana Tidung, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019, semangat aparaturnya dan sarana yang memadai. Kelemahannya adalah rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan SKP, Jangkauan pelayanan yang jauh dari pusat-pusat pelayanan, terbatasnya SDM aparaturnya, dan terbatasnya alokasi pembiayaan. Strategi yang digunakan Dinas Dukcapil dalam meningkatkan kualitas pelayanan SKP di Kabupaten Tana Tidung adalah Memanfaatkan Kekuatan dan meminimalisasi kelemahan-kelemahan yang ada. **Kesimpulan:** Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dalam Mengatasi permasalahan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah adalah Strategi memanfaatkan kekuatan dan meminimalisasi kelemahan dengan melakukan pengurusan Surat Keterangan Pindah (SKP) tidak perlu lagi mengharuskan pulang ke daerah asal mengurus SKP melainkan dapat difasilitasi Dinas Dukcapil Kabupaten Tana Tidung untuk berkomunikasi dengan daerah asal.

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Surat Keterangan Pindah, Analisis SWOT, Strategi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mobilitas penduduk tentunya mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pembangunan sebab mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas penduduk dan pembangunan akan saling mendukung pembangunan, artinya tidak ada pembangunan tanpa mobilitas penduduk, dan begitu juga sebaliknya. Tidak terjadi mobilitas penduduk tanpa ada pembangunan. Pada pihak lain, bilamana mobilitas penduduk ke daerah tersebut besar maka intensitas pembangunannya tinggi, dan sebaliknya bilamana arus mobilitas menuju daerah tersebut kecil maka intensitas pembangunannya akan rendah. Tinggi rendahnya mobilitas penduduk di suatu daerah akan berpengaruh terhadap strategi pembangunan yang dipilih, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang telah mendukung proses pembangunan tersebut. Pemerintah telah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Strategi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan dilakukan melalui pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan. Mobilisasi Penduduk tidak hanya memberikan dampak positif bagi suatu daerah tetapi bisa juga menjadi dampak negatif jika perpindahan penduduk tanpa adanya dokumen atau dalam ini tidak disertai surat keterangan pindah. Sebab surat keterangan pindah merupakan dasar dalam proses perekaman data kependudukan yang lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Lebih lanjut Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan

kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Salah satu peristiwa kependudukan adalah peristiwa perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam kurun waktu tertentu yang selanjutnya disebut migrasi penduduk. Migrasi penduduk umumnya terjadi dalam rangka memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun religious. Terdapat dua bentuk migrasi yaitu migrasi nasional yakni peristiwa perpindahan penduduk di dalam satu wilayah negara dan migrasi internasional yakni perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Beberapa bentuk dari migrasi nasional yaitu sirkulasi, ruralisasi, transmigrasi serta urbanisasi. Salah satu syarat bagi penduduk yang akan melakukan migrasi baik migrasi masuk maupun keluar wajib mengurus surat pindah datang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yaitu penduduk yang pindah tempat tinggal wajib memenuhi persyaratan administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Syarat administrasi yang dimaksud salah satunya adalah dokumen Surat Keterangan Pindah. Surat Keterangan Pindah adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal. Surat Keterangan Pindah ini wajib dimiliki penduduk yang pindah karena merupakan salah satu syarat dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi penduduk yang pindah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Kabupaten Tana Tidung adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan dan Nunukan melalui perjuangan deklarasi tokoh-tokoh masyarakatnya. Potensi dari daerah ini sangatlah banyak salah satunya dari sektor minyak dan gas yang menjadi penyumbang penghasilan terbesar di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data BPS provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung sendiri adalah kabupaten dengan Penduduk paling sedikit dari semua kabupaten/kota di Kalimantan Utara, yakni 25.584 jiwa (2020), dengan kepadatan penduduk 6 jiwa/km². Perpindahan penduduk yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu jumlah penduduk pendatang dalam Semester I Tahun 2022 sebanyak 834 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang pindah sebanyak 806 jiwa. Faktor yang mendukung banyaknya jumlah pendatang di Kabupaten Tana Tidung dikarenakan Kabupaten Tana Tidung adalah kabupaten terbaru di Provinsi Kalimantan Utara dengan potensi daerah yang besar menyebabkan pendatang ingin menetap dan membuka usaha seperti contohnya banyaknya penduduk migran dari suku Bugis dan Jawa yang membuka usaha di Kabupaten Tana Tidung serta penduduk yang melaksanakan urbanisasi ke Kabupaten Tana Tidung dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sedangkan perpindahan penduduk yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung didasari pada berbagai alasan diantaranya yaitu alasan pernikahan untuk mengikuti suami atau istri serta alasan pendidikan.

Selain itu kondisi Kabupaten Tana Tidung yang merupakan kabupaten yang baru dan masih berkembang juga membuat terbatasnya pelaksanaan pelayanan pendataan kependudukan yang masih harus di kembangkan. Penduduk yang tinggal di daerah daerah yang jauh terkadang kesulitan untuk mencapai kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk mengurus dokumen kependudukan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil utamanya permasalahan pindah penduduk di Kabupaten Tana Tidung perlu segera diatasi, dicarikan cara-cara yang tepat untuk dapat dilaksanakan di Kabupaten Tana Tidung yang memiliki banyak kendala. Hal ini menjadi begitu

mendesak karena ditinjau dari fungsinya, Surat Keterangan Pindah (SKP) merupakan salah satu dokumen penting yang sangat dibutuhkan oleh penduduk yang melaksanakan perpindahan tempat tinggal dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan lainnya. Oleh karena itu maka peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “**Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Pindah Di Kabupaten Tana Tidung**”.

1.2 Kesenjangan Masalah

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan kepengurusan dokumen-dokumen kependudukan terutama surat keterangan pindah ini adalah masalah yang harus dihadapi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tana Tidung. Beberapa inovasi yang pernah dilakukan seperti Pelayanan adminduk via Whatsapp. Pelayanan ini hadir pada tahun 2020 yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pelayanan secara langsung karena wabah covid-19. Namun pelayanan ini harus berhenti pada tahun 2021 karena telah dianggap kurang maksimal tidak dapat menyetuh penduduk di perkampungan yang belum paham akan penggunaan teknologi serta kesulitan online ke jaringan.

Selain itu, pelayanan adminduk dari desa ke perkampungan juga dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, pelayanan ini muncul dari awal tahun 2018 dan menargetkan pada masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan atau kota. Namun pelayanan ini berhenti pada pertengahan 2020 karena adanya wabah virus Covid-19. Dan juga faktor lokasi yang cukup jauh serta keterbatasan sumber daya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Tana Tidung (Azwar Halim 2020). Permasalahan yang menonjol yang sangat dirasakan saat ini adalah terletak pada proses pelaksanaan pelayanan di tingkat lapangan. Sebagai contoh seperti pelayanan perekaman data pindah penduduk, tidak semua masyarakat itu telah mengetahui bahwa pelayanan ini sudah bisa difasilitasi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Penyebabnya antara lain karena kurangnya sosialisasi, akses internet dan listrik yang belum terealisasi seluruhnya sehingga pendataan penduduk di Kabupaten Tana Tidung baru berjalan sekitar 85 persen.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Krisdianto. 2021. Penerapan Aplikasi Klampid (Kawin-Lahir-Mati-Pindah-Datang) bagi penduduk pindah datang di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya provinsi Jawa Timur. Penelitian ini berfokus pada penggunaan aplikasi Klampid untuk kepengurusan dokumen kependudukan dan salah satu objek dokumen kependudukan yang diteliti adalah keterangan surat pindah(Krisdianto, 2021).

Kedua, Syahri Ramadon, Firman, & Arabiah, 2019. Pelaksanaan Administrasi Pindah Datang Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana pelaksanaan administrasi mengenai dokumen keterangan surat pindah(Syahri et al., 2019).

Ketiga, Putri Lika Koetrian. 2014. Pelayanan Publik Urusa Pemerintahan Daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Penelitian ini memiliki fokus pada pelayanan dalam mengurus dokumen keterangan pindah penduduk(Putri Lika, 2014).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Krisdianto, 2021 Penelitian dilakukan di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif dengan teori Maskun dengan fokus Penerapan Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung menggunakan Metode Kualitatif dengan teori Analisis SWOT dengan fokus Strategi. Syahri Ramadan, Firman, Arabiah, 201 Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif dengan fokus pelaksanaan Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung menggunakan Metode Kualitatif dengan teori Analisis SWOT dengan fokus strategi. Putri Lika Koertrian, 2014 Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif dengan Fokus Pelayanan Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung menggunakan Metode Kualitatif dengan teori Analisis SWOT dengan fokus strategi.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pindah penduduk di Kabupaten Tana Tidung, Bagaimana strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas layanan pengurusan Surat Keterangan Pindah.

II. METODE

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, tindakan, perilaku (Moleong, 2018). Penulis menggunakan Strategi dan Analisis SWOT (Fred & Forest, 2015).

Informan pada penelitian ini terdapat 11 informan. Penelitian kualitatif, tehnik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* (sugiyono, 2018). Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, dengan menggunakan Analisis SWOT mengenai Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang Berkaitan tentang pengurusan Surat Keterangan Pindah (SKP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten tana tidung, provinsi Kalimantan utara. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dipadukan dengan analisis SWOT Di mana juga peneliti melakukan formulasi arah strategi dengan menggunakan matriks SWOT.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pindah penduduk di Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung dalam meningkatkan kualitas pelayanan surat keterangan pindah memiliki kekuatan yaitu Tersedianya peraturan daerah dan standar pelayanan merupakan bentuk upaya pemberian jaminan atas terselenggaranya pelayanan kependudukan yang baik. Dukungan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Dan komitmen yang tinggi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, walaupun keterbatasan SDM yang dimiliki. adanya Peraturan Perundang-undangan dan Standar Pelayanan yang mengatur tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tana Tidung. Tersedianya peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan merupakan bentuk upaya pemberian jaminan atas terselenggaranya pelayanan kependudukan yang baik. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang berlaku memberikan garis batas yang jelas pada hak dan kewajiban baik bagi aparatur dinas selaku pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Permasalahan mengenai pelayan surat keterangan pindah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Renstra Dukcapil Tana Tidung antara lain disebabkan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan serta belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur pelayanan Administrasi Kependudukan.

dimensi merumuskan dalam hal ini sudah terpenuhi karena setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tana Tidung sudah dirumuskan secara matang dan bersama-sama dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada sehingga keputusan atau kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan maksimal dan berjangka Panjang.

Selanjutnya strategi memberikan gambaran tentang kegiatan yang berawal dari pengembangan visi dan misi. Menetapkan tujuan strategis, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam tahap formulasi strategi ditetapkan bagaimana mengalokasi sumber daya dan kemana perluasan operasi dilakukan. Mengingat sumberdaya selalu terbatas, maka pilihan strategi harus ditetapkan untuk memperoleh manfaat terbesar. Implementasi strategi menunjukkan perlunya pihak dinas menjabarkan strategi menjadi tindakan, Tahap ini menjadi tahap sulit dan kritis sifatnya karena memerlukan disiplin dan komitmen dari personil pelakunya. Untuk itu diperlukan keterampilan interpersonal, karena aplikasi kegiatan akan berpengaruh pada semua unit operasional dalam organisasi.

ancaman lainnya dalam pelayanan yang perlu diperhatikan adalah pihak ketiga yang memanfaatkan proses pelayanan. Pihak ketiga ini biasanya dapat memanfaatkan keadaan dengan menawarkan jasa dalam pengurusan prosedur layanan. Jika masyarakat dapat memahami persyaratan dan prosedur pelayanan yang diberikan maka pihak ketiga tidak akan memanfaatkan keadaan, karena pihak dinas telah memberikan kemudahan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan pada peraturan perundangundangan. Kelemahan ini akan sulit diatasi jika keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat dalam memproses surat keterangan pindah dan juga tidak ada evaluasi dalam peningkatan pelayanan oleh pemerintah pencatatan sipil kabupaten tana tidung.

Peluang yang dimiliki adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri dimana sangat penting mengurus surat keterangan pindah langsung ke kantor pencatatan sipil. Kesadaran akan pentingnya mengurus surat keterangan pindah, masyarakat sudah difasilitasi oleh pemerintah kantor pencatatan sipil untuk mengambil formulir secara online dengan mengakses website <http://disdukcapil.tanatidungkab.go.id/download/index/20>. Sosialisasi diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan sehingga tujuan dan sasaran dinas dapat tercapai. Hal ini ditujukan untuk mengatasi ancaman yang akan dialami di masa yang akan datang dalam melakukan peningkatan pelayanan kependudukan di Kabupaten Tana Tidung.

Melihat kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tana Tidung dalam memberikan pelayanan surat keterangan pindah maka penulis menggambarkan suatu Matriks Untuk memberikan penjelasan mengenai konsep SWOT yang sudah dianalisis oleh penulis. Matriks Ini ditujukan untuk memperjelas analisis yang sudah dibuat oleh penulis sebelumnya dengan menggambarkan poin faktor internal dan eksternal yang sudah dijalani oleh dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota Tana Tidung dalam upayanya meningkatkan pelayanan kependudukan dalam melayani masyarakat untuk mengurus surat keterangan pindah. Berikut matriks SWOT yang menjelaskan strategi peningkatan pelayanan kependudukan Dalam memberikan Surat Keterangan Pindah masyarakat Tana Tidung.

Berdasarkan hal di atas penulis simpulkan bahwa ada beberapa point point yang mengakibatkan tidak maksimalnya informasi yang sampai kepada masyarakat karena banyak

masyarakat yang menganggap pengurusan administrasi itu rumit dan tidak adanya sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang alur dalam pengurusan dimana formulir dapat diambil melalui website

3.2 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan Surat Keterangan Pindah di Kabupaten Tana Tidung.

Sesuai dengan misi Kabupaten Tana tidung yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan visi terwujudnya Tana Tidung yang Bermartabat, Sejahtera, Indah, dan Humanis (BERSIH). Salah satu yang bisa dilakukan dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu melakukan pelatihan tentang tupoksi dan SOP pelayanan kepada setiap pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tana Tidung serta juga bisa dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pengurusan administrasi untuk penduduk pendatang maupun penduduk yang akan pindah dari Kabupaten Tana Tidung. Pengurusan SKP secara normatif memang seharusnya setiap penduduk yang pindah antar Kabupaten/kota, mengurus SKP sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan di daerah tujuan. Adapun alur pelayanan penerbitan SKP sebagaimana disajikan pada Gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Alur Pelayanan Surat Keterangan Pindah (SKP)



Mencermati alur pada Gambardi atas, SKP seharusnya diurus dan diterbitkan sebelum penduduk pindah dari daerah asal. Namun demikian, pada kenyataannya banyak penduduk yang pindah tidak mengurus SKP terlebih dahulu sehingga sampai saat ini mengalami kendala dalam pengurusan dokumen kependudukannya. Sebagaimana diinformasikan oleh Kabid Pendaftaran Penduduk dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, Bapak Romi Okta Irawan, saat ini sekitar tiga ribu penduduk termasuk dengan penduduk yang datang ke Kabupaten Tana Tidung belum mengurus Surat Keterangan Pindah sehingga belum mempunyai identitas baru di tempat tinggalnya saat ini, Kondisi ini menjadi sulit karena penduduk bersangkutan tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke daerah asal untuk mengurus Surat Keterangan Pindahnya. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan warga Tanah Tidung yang mengaku pendatang hingga saat ini tidak membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asalnya.

Kondisi seperti ini sangat menyulitkan bagi penduduk yang bersangkutan karena seringkali untuk kembali ke daerah asal untuk mengurus SKP membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Selanjutnya akibat kendala ini penduduk bersangkutan tidak mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan sebagaimana yang diperoleh penduduk yang memiliki identitas atau domisili setempat. Untuk itu diperlukan terobosan atau strategi yang tepat untuk mengatasi hal ini. Pasal 31 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa kendala tersebut sangat mungkin diatasi di daerah tujuan. Petugas Disdukcapil daerah tujuan dapat membantu mengkomunikasikan ke Disdukcapil asal, sehingga warga tersebut tidak perlu Kembali ke kota asal. Pasal 17 pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal. Dengan demikian, warga tersebut tidak mendapatkan Kartu keluarga dan KTP sebelum SKP terbit dari kota asalnya.

Menurut Sagala (2007) mengenai formulasi strategi bahwa terdapat lima langkah yang digunakan untuk merencanakan strategi yaitu perumusan misi, mengakomodasi kebutuhan lingkungan, mendayagunakan sumber daya secara optimal, penjabaran dari pencapaian misi, dan memilih strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Disdukcapil Kota Tana Tidung telah menerapkan Strategi Memanfaatkan Kekuatan berupa Peraturan Menteri Dalam negeri 108 tahun 2019 yang memungkinkan melekuakan pengurusan SKP dari daerah tujuan dengan menggunakan surat elektronik untuk berkomunikasi ke daerah asal, walaupun masih dijumpai beberapa kendala dalam implementasinya. Dalam hal dijumpai penduduk Tanah Tidung yang pindah ke Kabupaten/Kota lain dan tidak dilengkapi SKP, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tana Tidung akan memberikan pelayanan pindah kependudukan, dan surat pindah dikirimkan ke alamat tujuan. Dari hasil Observasi dan wawancara diperoleh informasi bahwa sarana dan prasarana di kantor dinas Pencatatan sipil Kabupaten Tana Tidung terbilang baik sehingga masyarakat dapat mengurus surat keterangan pindah dengan lancar. Peneliti juga mewawancarai warga yang sedang mengurus surat keterangan pindah dengan kasus dia tidak mengurus terlebih dahulu surat keterangan pindah dari kota asal. “Saya warga pendatang di Kabupaten Tana Tidung, Hari ini mau mengurus surat keterangan pindah agar dapat mengurus sekolah anak saya dibulan juni nanti yang harus pakai zonani, dan saya takut anak saya tidak diterima disekolah manapun dikarenakan masih menggunakan KK kota dulu sebelum kesini”

Di samping hal-hal tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa masyarakat Pendatang maupun yang ingin pindah untuk mengurus dokumen terutama Surat Keterangan Pindah, sudah difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengambil formulir secara online dengan mengakses website. Demikian juga halnya dengan sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana tidung melalui website pemerintahan. Belum ada kantor Perwakilan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di kampung – kampung, akses ke kota dari kampung menempuh jarak yang jauh dan minim kendaraan umum, dibutuhkannya biaya lebih dan waktu untuk mengurus ke kantor dinas pencatatan sipil.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan hal yang penulis sajikan sesuai analisis SWAT yang peneliti sajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1
Diskusi Temuan Utama

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p style="text-align: center;">Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Regulasi yang kuat dari mulai Undang – Undang sampai dengan peraturan daerah. 2. Adanya Minat Masyarakat yang ingin dibantu dan difasilitasi pengurusan surat keterangan Pindah. 3. Salah satu program pemerintah dalam pemerataan penduduk yaitu dengan pemdataan surat keterangan pindah. 4. Formulir dapat diakses dengan mudah di webset Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. 	<p style="text-align: center;">Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sumber daya manusia yang tersebar disetiap kampung – kampung. 2. Laju Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. 3. Anggaran yang belum mencukupi.
<p style="text-align: center;">Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Minat Masyarakat Pendatang maupun yang ingin pindah untuk mengurus dokumen terutama surat keterangan Pindah. 2. masyarakat sudah difasilitasi oleh pemerintah kantor pencatatan sipil untuk mengambil formulir secara online dengan mengakses website. 3. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana tidung melalui website pemerintahan. 	<p style="text-align: center;">Startegi (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan regulasi yang ada kepada masyarakat. 2. Melengkapi sarana dan prasarana dikantor dukcapil agar lebih nyaman. 3. Mempermudah dengan system online. 4. memanfaatkan dana untuk memfasilitasi masyarakat agar lebih mudah untuk mengurus surat keterangan pindah. 5. Mengusulkan untuk dibuatnya aturan terkait status masyarakat pendatang seperti tinggal sementara, tinggal permanen (pindah). 	<p style="text-align: center;">Strategi (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aparatur dalam bidang pelayanan ditambah. 2. Memanfaatkan social media untuk media sosialisasi. 3. Melakukan pembinaan SDM agar standar pelayanan dapat terus meningkat. 4. Memanfaatkan dana untuk mendukung program – program pemerintah tana tidung khususnya pengetahuan dalam alur pengurusan surat keterangan pindah. 5. Mengadakan pemutihan penduduk pendatang sehingga seluruh penduduk pendatang dapat dilayani dalam 1 waktu bersamaan.

Threats (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kantor Perwakilan atau UPTD Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil di kampung – kampung. 2. Akses ke kota dari kampung menempuh jarak yang jauh dan minim kendaraan umum. 3. Dibutuhkannya biaya lebih dan waktu untuk mengurus ke kantor dinas pencatatan sipil. 4. Adanya penawaran jasa pihak ketiga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar administrasi. 2. Mendirikan kantor UPTD di setiap kecamatan dengan memaksimalkan jumlah aparatur dan dana yang ada. 3. Melakukan penyederhanaan pengurusan surat keterangan pindah dalam satu hari. 4. Melakukan Kerjasama dengan aparatur kelurahan maupun RT/RW untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan surat keterangan pindah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan aparatur baik ketua kelurahan, ketua RT/RW untuk membantu mensosialisasikan dan membantu memproses surat keterangan pindah. 2. Memanfaatkan Tv daerah maupun social media yang dimiliki kabupaten Tana Tidung untuk mensosialisasikan agar masyarakat sadar akan pentingnya administrasi. 3. Melakukan pendataan terhadap warga pendatang

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat dan pendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melayani penerbitan Surat Keterangan Pindah:
 - a. Faktor Penghambat dalam pelayanan SKP yang menonjol adalah rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan SKP, Jangkauan pelayanan yang jauh dari pusat-pusat pelayanan, terbatasnya SDM aparatur, dan alokasi pembiayaan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terbatas.
 - b. Faktor Pendorong dalam pelayanan SKP tergambar jelas bahwa Peraturan Perundangan atau Pasal 31 Permendagri 108 tahun 2019; antusiasme masyarakat untuk mengurus SKP, semangat aparatur dalam melayani masyarakat dan dukungan sarpras yang cukup memadai.
2. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dalam Mengatasi permasalahan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah adalah Strategi memanfaatkan kekuatan dan meminimalisasi kelemahan dengan melakukan pengurusan Surat Keterangan Pindah (SKP) tidak perlu lagi mengharuskan pulang ke daerah asal mengurus SKP melainkan dapat difasilitasi Dinas Dukcapil Kabupaten Tana Tidung untuk berkomunikasi dengan daerah asal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data penulis yaitu dokumentasi, wawancara dan Observasi.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, diharapkan ada masukan serta saran guna melengkapi penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fred, R. David & Forest. 2015. *Manajemen strategi: konsep*. Jakarta: Salemba empat.
- Sugiyono. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Koetriaana, P.L. 2014. *Pelayanan publik urusan pemerintah daerah bidang kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pekanbaru (Studi pengurusan surat keterangan pindah datang)*.
- Krisdianto. 2021. *Penerapan aplikasi Klampid Bagi penduduk pindah datang di dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota Surabaya*.
- Syahri Romadhon., F. A. 2019. *Pelaksanaan administrasi pendaratan pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bima*.

